

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum sudah menjadi tujuan utama bagi setiap negara, termasuk di negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada alenia ke empat terdapat dua dari empat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum (UUD 1945). Adapun tujuan negara tersebut mengandung arti dan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Diperjelas dengan adanya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pemerintahan memerlukan tuntutan khusus, yakni wadah yang berperan sebagai simbol filosofis, fungsional, dan teknis, serta fungsi keterbukaan sebagai simbol wakil dari masyarakat suatu daerah.

Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka meningkat pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupaya memusatkan semua instansi di dalam satu lokasi, dikarenakan letak beberapa instansi saat ini menyebar di seluruh Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menyebabkan kurang terpadunya kinerja antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.

Berdasarkan uraian diatas, dibutuhkan Gedung Pelayanan Publik yang terpadu untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja antar instansi, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kualitas fasilitas publik yang menyangkut sarana dan prasarana Pemerintahan dan kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sekarang dengan juga harus tetap memperhitungkan perkembangan kedepan dalam membangun pemerintahan yang bijak.

Dimasa pandemi ini optimalisasi aksesibilitas sangat dipertimbangkan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat disaat mengurus perizinan. Adapun ruang-ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi aktivitas bangunan ini ialah front office dan back office dengan berbagai unit pelayanan, ruang penunjang, serta ruang terbuka komunal yang menjadi penunjang bangunan yang ada disekitarnya. Semua ruang tersebut direncanakan untuk memfasilitasi setiap kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan pelayanan serta pengunjung sekitaran tapak.

Tujuan dari perancangan *Public Service Building in Lampung Timur* dengan pendekatan *Universal Design* adalah: menciptakan fasilitas untuk publik pada mall pelayanan publik dengan konsep universal di masa pandemi maupun bagi penyandang disabilitas di Lampung Timur yang nyaman agar mereka mampu secara mandiri melakukan aktivitasnya, merancang fasilitas kantor yang menarik bagi pengunjung dan karyawan, menciptakan fasilitas kantor yang dapat membuat pengunjung dan karyawan nyaman berada di gedung

pelayanan publik ini dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kantor pemerintahan dan mendukung program pemerintah tentang *universal design*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang sudah diungkapkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana menciptakan ruang publik yang adaptif terhadap masa pandemi, sehingga masyarakat tetap bisa sejahtera dengan pelayanan publik di Indonesia khususnya di Lampung Timur. Persyaratan dari setiap ruang pun juga harus terpenuhi dan gedung harus bisa berfungsi dengan baik.

## 1.3. Tujuan dan Sasaran

### 1.3.1. Tujuan

- a. Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan sesuai dengan kasus yang ada di Indonesia.
- b. Merancang Gedung Pelayanan Publik yang dapat mengakomodasi fungsi secara maksimal dan adaptif di era pandemi.
- c. Merencanakan desain bangunan yang terintegritas dan *sustainable* untuk proses pelayanan pada masa pandemi.

### 1.3.2. Sasaran

Sasaran dari tersusunnya LP3A ini adalah sebagai acuan atau langkah dasar dalam proses perencanaan dan perancangan *Public Service Building* berdasarkan hasil analisa terhadap aspek-aspek panduan perencanaan dan perancangan serta aturan yang berlaku.

## 1.4. Manfaat

### 1.4.1. Subyektif

Manfaat dari LP3A ini secara subyektif adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti tugas akhir di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan sebagai acuan/pedoman untuk tahap selanjutnya, yaitu dalam proses perumusan program dasar perencanaan dan perancangan.

### 1.4.2. Obyektif

Manfaat dari LP3A ini secara obyektif adalah untuk memberi tambahan pengetahuan dan perkembangan ilmu di bidang arsitektur mengenai sarana pelayanan publik yang adaptif di era pandemi. Memberikan rekomendasi untuk perencanaan *Public Service Building* yang adaptif di era pandemi.

## 1.5. Metode Bahasan

Di era pandemi ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan pendekatan konvensional untuk mendapatkan program ruang. Luasan lahan yang belum tentu mengakomodasi ataupun terlalu besar untuk kapasitas ruang yang seharusnya pada *Public Service Building* harus diidentifikasi dengan beberapa pendekatan, antara lain:

#### **1.5.1. Studi Literatur**

Dilakukan dengan memahami literature baik melalui buku, jurnal, dan bahan-bahan literature lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **1.5.2. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan survei langsung lapangan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan untuk memperoleh gambaran eksisting obek studi yang menadi bahan kajian, serta mengamati langsung aktifitas dan pross pelayanan di Pelayanan Publik Lampung Timur.

Dengan pendekatan ini, maka alur untuk proses studi lapangan akan dilaksanakan untuk menentukan ruang akan dibagi menjadi 2 alur kegiatan, yaitu pemetaan pelaku ruang, dan survey referensi pengguna. Pemetaan ini akan dijadikan dasar untuk penentuan tipe ruang, keterbutuhan ruang serta fasilitas yang dibutuhkan.

#### **1.5.3. Metode Dokumentatif**

Metode dokumentatif merupakan suatu metode pembahasan yang dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menadi bahan penyusunan laporan ini. Mendokumentasikan data dengan memperoleh gambar visual berupa foto, catatan wawancara, maupun pengamatan survei.

#### **1.5.4. Wawancara**

Dilakukan proses wawancara langsung kepada pegawai serta masyarakat yang sedang menggunakan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan data non fisik.

#### **1.5.5. Studi Banding**

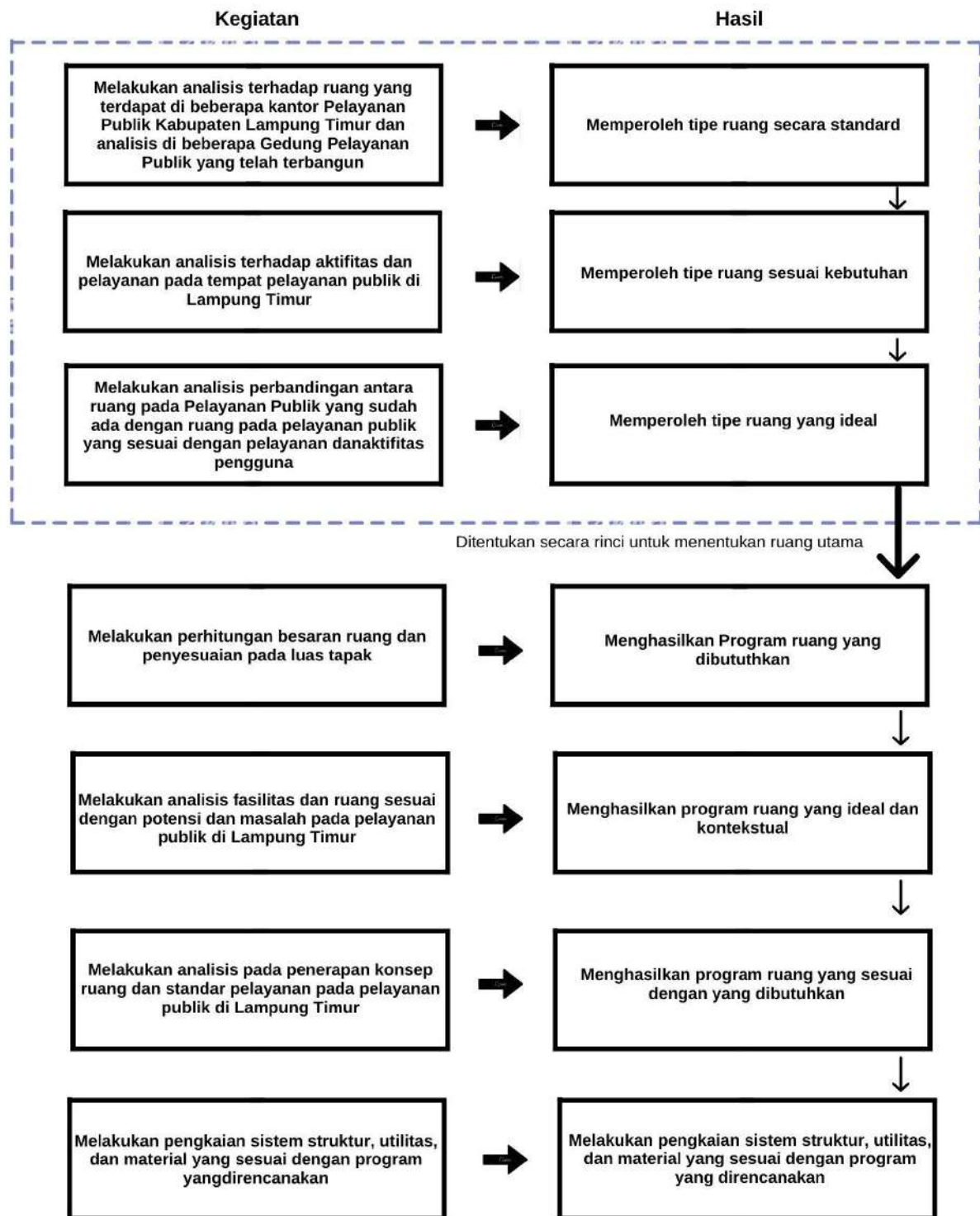
Metode ini dilaukan dengan melakukan pengamatan dan membandingkan obek arsitektur yang berkaitan dan telah terbangun untuk menemukan data yangdibutuhkan dalam proses perencanaan dan perancangan *Public Service Building* dengan peninauan langsung ke lapangan, melihat buu, urnal ataupun internet.

Pendekatan diawali dengan analisa program ruang yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi dan standard yang ada dengan mepertimbangkan kondisi pandemi.Setelah iu, dilakukam perhitungan luasan ruangan yang dibutuhkan dan di sesuaikan dengan luas lahan pada site.

Setelah mendapatkan progra ruang yang ideal baik untuk ruang utama maupun ruangan penunang, penulis melakukan pendekatan desain dengan menentukan konsep ruang yang dibutuhkan di era pandemi dan sesuai dengan palayanan dan fungsi masing-masing ruang.

Pendekatan terakhir yaitu pendekatan aspek kinera untuk menentukan sistem struktur, utilitas, material yang sesuai dengan program dan konsep yang direncanakan.

Berikut ini adalah skema pendekatan yang disusun oleh penulis dalam melakukan pendekatan perencanaan dan perancangan *Public Service Building* yang adaptif di era pandemi:



## 1.6. Lingkup Bahasan

Ruang lingkup yang akan dibahas mencakup tiga hal berikut, yaitu:

### a. Lingkup Substansial

Secara substansial, rancangan yang dibuat pada Tugas Akhir ini akan menyelesaikan persoalan yang sudah diungkapkan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana enciptakan ruang publik yang adaptif terhadap asa pandemi. Seluruh pelaku an kegiatan yang ada didapatkan dari kasus eksisting. Artinya, gedung ini dianggap akan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, sesuai kondisi eksisting yang teradi saat ini.

b. Lingkup Spasial

Gedung pelayanan publik ini akan berada di Jl. Buay Selaga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lapung Timur. Site berada di lahan kosong tidak berkontur milik pemerintah daerah (pemda).

c. Lingkup Waktu

Rancangan yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini akan berada pada konteks waktu nyata yang terjadi saat ini. Kapasitas gedung disesuaikan dengan data yang didapatkan dari beberapa pendekatan di atas. Rancangan ini tidak akan menyajikan hal yang bersifat prediktif, misalnya seperti meningkatnya kapasitas gedung ini di masa yang akan datang. Hal tersebut diputuskan dengan menimbang terbatasnya ulah pendaftar setiap harinya, sehingga peningkatan kapasitas seperti yang sudah diungkapkan sebenarnya bisa diantisipasi melalui kontrol pengelola.

### 1.7. Kerangka Penulisan

Pembahasan ditulis dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang apa permasalahan yang akan diselesaikan pada tugas akhir ini, serta bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

#### **BAB II Kajian Pustaka**

Berisi literatur tentang kajian dari peraturan, landasan, standar, referensi, maupun studi preseden terkait gedung pelayanan publik serta tentang konsep desain yang *sustainable*.

#### **BAB III Data**

Berisi mengenai tinjauan yang terkait dengan kondisi eksisting bangunan, meliputi tapak, kegiatan pelaku pelayanan publik.

#### **BAB IV Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan**

Berisi mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menentukan program ruang yang akan digunakan beserta dengan teknis yang akan diterapkan.

#### **BAB V Program Perencanaan dan Perancangan**

Berisi mengenai hasil dari pendekatan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya dan landasan dalam melakukan eksplorasi desain.

1.8. Alur Pikir

